JURNAL CYBER PR
Fakultas Ilmu Komunikasi
Univesitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Aplikasi Mobile "DPR Now!" Dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik oleh DPR RI

Asrizia Shavilla[1], Muhammad Saifulloh[2*]

[1,2]Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jl. Hang Lekir I No. 8, Jakarta Pusat, Indonesia
*Email korespondensi: musyaffa00@yahoo.com

Abstract - *All public bodies in Indonesia must be open about public information. As a state institution, the DPR RI must also be open. This is realized through the mobile application used "DPR Now!". A DPR RI information service application managed by the DPR RI Public Relations. The purpose of this study is to analyze how the implementation of the mobile application "DPR Now!" in the fulfillment of the right to public information by the DPR RI. Using the concept of public information, as well as the post-positivism paradigm with the case study method. Determination of sources by using purposive sampling. As for the results of research related to the fulfillment of public information, the mobile application "DPR Now!" contains complete information and services regarding the activities and performance of members of the DPR RI and it is also easy to access the application. "DPR Now!" application is one of the media that bridges members of the DPR RI with the general public, because of the application "DPR Now!" This is a tool to disseminate information and services to the public anywhere and is also easily accessible and looks very attractive.*
Keywords*: application mobile dpr now; public information; right, dpr ri*

Abstrak - Pada saaat ini hampir seluruh organisasi, perusahaan, maupun badan publik telah memanfaatkan dan menggunakan media internet sebagai sarana pemberian informasi kepada khalayak, salah satu badan publik di Indonesia yang sangat memperhatikan kebutuhan informasi dengan menggunakan teknologi internet adalah salah satunya DPR RI. Lembaga DPR RI menggunakan aplikasi untuk menyampaikan informasi yang sifatnya interaktif dengan publik eksternalnya. Aplikasi mobile yang digunakan "DPR Now", adalah sebuah aplikasi layanan informasi DPR RI yang dikelola oleh Humas DPR RI. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaiaman implementasi aplikasi mobile "DPR Now!" dalam pemenuhan hak atas informasi publik oleh DPR RI. Menggunakan konsep aplikasi mobile dan konsep informasi publik, serta menggunakan paradigma post positivism dengan metode studi kasus. Penentuan narasumber dengan memakai purposive sampling. Adapun hasil penelitian Terkait pemenuhan informasi publik, aplikasi mobile "DPR Now!" sebagai salah satu media informasi dan pelayanan untuk publik, karena aplikasi tersebut berisi informasi dan pelayanan yang lengkap seputar kegiatan dan kinerja anggota DPR RI dan mudah juga cara mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi "DPR Now!" adalah salah satu media yang menjembatani Anggota DPR RI dengan masyarakat umum, karena aplikasi "DPR Now!" ini menjadi alat pembantu menyebarluaskan informasi dan pelayanan untuk publik di manapun dan juga mudah diakses dan tampilannya sangat menarik.
Kata Kunci: informasi pubik; aplikasi *mobile dpr now*, hak, dpr ri

PENDAHULUAN

Informasi yang bisa diterima oleh publik adalah informasi yang serta merta, setiap saat dan berkala. Informasi serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi berkala adalah informasi mengenai kegiatan

ISSN (online) 2798 - 0561
https://journal.moestopo.ac.id/index.php/cyberpr

layanan infromasi publik yang dilaksanakan sarana dan prasarana layanan informasi publik serta laporan penggunaannya.

Adapun yang dimaksud dengan informasi setiap saat meliputi hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan disampaikan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja, serta laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Internet merupakan salah satu alat teknologi jaringan komputer saat ini dan sebagai sumber informasi yang sangat diperlukan. Jaringan ini dapat menghubungkan seluruh pengguna komputer dari belahan dunia dan mampu menyajikan informasi secara lengkap dan aktual yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia akan informasi, komunikasi saling bertukar keputusan pribadi maupun kelompok guna mencapai tujuan serta kemajuan masing-masing.

Kemudahan untuk diakses dimanapun dan kapanpun membuat internet menjadi media yang sangat menarik bagi semua kalangan. Internet pada dasarnya merupakan sebuah jaringan antara komputer yang saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terus menerus sebagai pesan-pesan elektronik termasuk email., transmisi data dan komunikasi dua arah antar individu.

Pada dasarnya sebuah teknologi diciptakan untuk membuat pekerjaan manusia lebih mudah, cepat dan efisien. Teknologi yang semakin berkembang ini membuat semua aspek kehidupan tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seiring dengan perkembangan era globalisasi tuntutan kebutuhan pertukaran informasi dalam berkomunikasi menjadi sangat mutlak untuk dilakukan (Suryanto 2015) dalam (Ratnamulyani et al., 2016)

Media internet sebagai media yang praktis dan efesien, sehingga tidak salah kalau masyarakat maupun perusahaan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Untuk melakukan interaksi melalui internet individu dengan lembaga biasanya pada aplikasi dalam genggaman tangan.

Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Itu dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan dan akses pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam genggaman” (Nasrullah, 2015).

Di dalam sebuah organisasi pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut tentunya harus direncanakan dalam suatu program atau metode tertentu harus direncanakan dalam suatu program atayu metode tertentu kemudian dirumuskan dalam bentuk startegi yang kemudian diimplementasikan didalam kegiatan operasionalnya sehari-hari.

Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang seiring dengan kemajuan jaman. Masyarakat modern kini menjadikan informasi sebagai kebutuhan pokok. Dalam hal ini informasi masyarakat seakan tidak mau ketinggalan sedikitpun. Sumber-sumber untuk mendapatkan informasi bisa berasal darimana saja. Baik itu lingkungan yang terdekat seperti keluarga dan pertemanan, bisa pula melalui media-media lainnya seperti media cetak, media elektronik maupun media massa.

Perkembangan ini salah satunya dipengaruhi oleh hadirnya inovasi sistem operasi berbasis Android yang mengandalkan koneksi internet dalam melakukan komunikasi (Kusumaningati, 2012). Setelah hadirnya Android, pengalaman berkomunikasi tidak hanya menggunakan fungsi telepon reguler dan SMS saja. Berkomunikasi telah menggunakan fungsi internet sehingga dapat dilakukan melalui berbagai macam cara bahkan hingga lintas benua,

diantaranya melalui aplikasi percakapan, bertelepon menggunakan jaringan internet, melakukan kontak seperti layaknya walkie talkie, berkomunikasi melalui email, mencari informasi melalui website, dan sebagainya (E.W, 2012), dalam (Saleh & Thahir, 2019).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan good governance. Dalam undang-undang tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mendapatkan jaminan, dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008. "Publik berhak mengetahui informasi, karena Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional" (Indah & Hariyanti, 2018; Trisnani, 2018).

Di era keterbukaan informasi, semua lembaga yang termasuk dalam kategori Badan Pubik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut untuk dapat menerapkan tata kelola yang baik. Untuk mencapai tata kelola yang baik perlu ditetapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Transparansi sangat penting dilakukan pada Badan Publik, hal ini mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis.

Pada saaat ini hampir seluruh organisasi, perusahaan, maupun badan publik telah memanfaatkan dan menggunakan media internet sebagai sarana pemberian informasi kepada khalayak, salah satu badan publik di Indonesia yang sangat memperhatikan kebutuhan informasi dengan menggunakan teknologi internet adalah salah satunya Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Gambar 1. Aplikasi Digital "DPR Now"
(Sumber: www.dpr.go.id)

Lembaga DPR RI menggunakan media internet untuk menyampaikan informasi yang sifatnya interaktif dengan publik eksternalnya. Aplikasi digital yang digunakan "DPR Now", adalah sebuah aplikasi digital layanan informasi DPR RI yang dikelola oleh Humas DPR RI. Yang digunakan sebagai media untuk memberikan seputar informasi kepada publik mengenai kegiatan DPR RI, risalah rapat pembahasan Undang-undang, Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA), laporan realisasi anggaran, naskah akademik, laporan kunker dan studi banding. Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan laporan realisasi anggaran-anggaran DPR RI, aspirasi, dan pengaduan.

Di era keterbukaan informasi, semua lembaga yang termasuk dalam kategori Badan Pubik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut untuk dapat menerapkan tata kelola yang baik. Untuk mencapai tata kelola yang baik perlu ditetapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Transparansi sangat penting dilakukan pada Badan Publik, hal ini mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis.

Membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi, pemerintah memang harus menjaga keseimbangan antara menutup informasi dan kepentingan publik. Namun, bagaimanapun kepentingan publik tetap harus didahulukan melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta tata kelola yang baik dan peran serta masyarakat. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Untuk itu, badan publik berkewajiban untuk melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan.

Derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pemerintah, khususnya Humas pemerintahan, yang berperan penting dalam pengelolaan komunikasi publik. Dalam tugas pokok dan fungsinya, humas pemerintahan memiliki kewajiban untuk memastikan hak masyarakat atas informasi, meningkatkan partisipasi public dalam kebijakan dan membantu jalannya pemerintah yang transparan (Idris, 2014), humas pemerintah memiliki peran yang penting dan strategis. humas pemerintah akan selalu dituntut untuk menghadapi perubahan di lingkungannya yang terjadi sangat cepat di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi informasi (Risal, 2016) dalam (Priyatna et al., 2020).

Disahkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas (UU Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Regulasi yang berkaitan dengan kebebasan informasi atau lebih dikenal keterbukaan informasi publik di Indonesia akan selalu memuat hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan (proporsional), dan cara sederhana, adanya pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Pada dasarnya sebuah teknologi diciptakan untuk membuat pekerjaan manusia lebih mudah, cepat dan efisien. Teknologi yang semakin berkembang ini membuat semua aspek kehidupan tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seiring dengan perkembangan era globalisasi tuntutan kebutuhan pertukaran informasi dalam berkomunikasi menjadi sangat mutlak untuk dilakukan (Suryanto 2015) dalam (Ratnamulyani et al., 2016).

Perkembangan teknologi dan informasi semakin melengkapi kebutuhan manusia dalam era digital saat ini. Dengan adanya kemajuan tersebut, membuat semua aspek kehidupan tidak dapat terlepas dari penggunaan teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beriringan dengan berkembangnya teknologi informasi menuntut kebutuhan pertukaran informasi dalam berkomunikasi menjadi sangat mutlak.

Media sosial telah memungkinkan lahirnya bentuk baru dari organisasi sosial dan interaksi sosial berbasis jaringan informasi elektronik. Walaupun teknologi infor- masi tidak secara langsung menyebabkan perubahan sosial, namun teknologi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari banyaknya pergerakan dalam perubahan sosial seperti bentuk baru produksi dan manajemen, adanya media komunikasi baru atau populer disebut sebagai globalisasi ekonomi dan budaya. Media sosial juga telah melahirkan bisnis baru, cara berdagang yang berbeda, bisa menjadi sumber penghasilan bahkan bisa membantu lembaga dalam menjalankan tujuannya (Anwar & Rusmana, 2017).

Keterbukaan informasi seperti ini merupakan salah satu karakteristik utama Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*). Dengan adanya keterbukaan informasi di bidang pengelolaan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh UU ini, akses masyarakat kepada informasi yang dimiliki oleh birokrat dan pejabat publik menjadi lebih muda.

Atas perubahan teknologi, mobilitas, akses, dan pelayanan serta tuntutan masyarakata yang semakin terbuka, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhasil membidani sebuah aplikasi digital yang diberi nama "DPR Now!" sebagai bukti keterbukaan dan responsive terhadap perubahan dan kemajuan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Penilaian tersebut terkait informasi tentang regulasi keuangan, kinerja dan profile mereka yang dibuka kepada publik yang semuanya ditampung di websitenya.

Tingginya intensitas kerja serta kuatnya tuntutan akan kerja DPR RI, telah mengharuskan DPR RI mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat akan ketersediaan informasi dan dokumentasi. Masyarakat menuntut DPR RI bisa menyediakan informasi dan dokumentasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI serta tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sudah berhasil mengupayakan keterbukaan akses informasi bagi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

Kebutuhan membuat aplikasi digital "DPR Now!" ini sebagai akibat dari meningkatnya permintaan informasi publik pada lembaga DPR RI pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 permintaan informasi di DPR yang tercatat sebanyak 38 permintaan infromasi. Sementara untuk permintaan informasi di DPR tahun 2011 mengalami kenaikan signifikan. Jumlah permintaan informasi yang telah tercatat sepanjang tahun 2011 sudah mencapai 200 permintaan informasi. (Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI (Helmizar, n.d.).

Informasi publik yang diminta sebagian besar adalah informasi terkait, risalah rapat pembahasan Undang-undang, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), laporan realisasi anggaran, naskah akademik, laporan kunker dan studi banding. Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan laporan realisasi anggaran-anggaran DPR RI. Data peningkatan permintaan informasi tersebut membuktikan keberhasilan DPR dalam hak atas informasi publik.

DPR telah melakukan banyak trasnparasi, aplikasi digital "DPR Now!" salah satu bentuk transparansi, secara terbuka dan online DPR menyajikan semua kegiatan anggota DPR, pengaduan, aspirasi, hasil rapat komisi dan daftar anggota. DPR Now baru di release pada bulan Agustus 2018. Seabagai bentuk komitmen mematuhi undang-undang ().

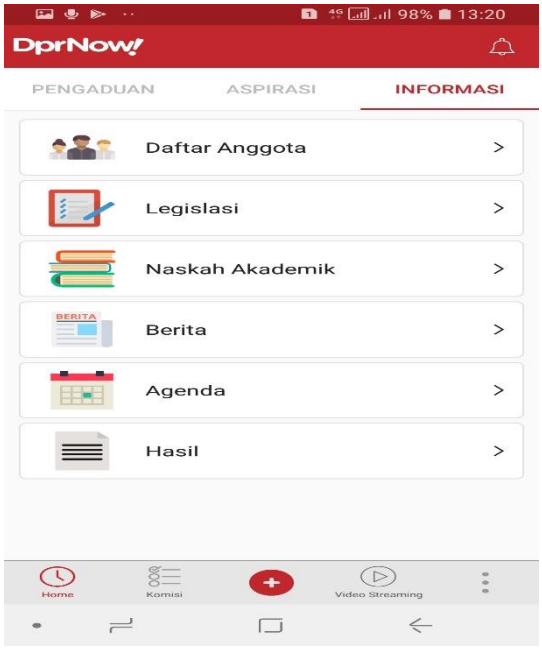

Gambar 2. Halaman Informasi DPR Now!
(sumber: aplikasi DPR Now!)

Tujuan dari DPR Now adalah menjalin hubungan baik dengan masyarakat, memberikan sebuah layanan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepuasan akan hasil kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR agar menciptakan suatu citra yang baik di mata para masyarakat. Maka dari itu fungsi humas DPR RI yang selama ini lebih bersifat "pasif" sebagai pemberi atau sumber berita bagi pekerja media, kini mulai menjadi "aktif" untuk memperoduksi berita dengan pola dan kategori populer, seperti yang biasa digunakan pada media umum atau media komersial yang ada di masyarakat.

Untuk memperkuat penelitian ini maka digunakan landasan teori, Lev Manovich (2002) mengidentifikasi lima karakteristik digital, yakni numerik representasi; modularitas (prinsip perakitan unit yang lebih besar dari yang lebih kecil); otomatisasi; variabilitas; dan transcoding (hubungan antara komputasi dan budaya sehari-hari). Menurutnya, konsep digital selalu berkaitan erat dengan media, karena media terus berkembang seiring dengan majunya teknologi dari media lama sampai media terbaru, sehingga mempermudah manusia dalam segala bidang yang berkaitan dengan Konsep aplikasi mobile (Aji, 2016).

Digital adalah sebuah metode yang kompleks, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Sedangkan aplikasi mobile adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan Zaman mengenai Teknologi dan Sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas.
Saat ini, era teknologi digital tengah dimulai. Semua serba teknologi. Apakah ini yang disebut era modern, era yang sudah diprediksi oleh para ilmuwan sejak dulu. Era, di mana seluruh kegiatan manusia dikendalikan oleh kecanggihan teknologi: digitalisasi. Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau manual. Tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Sistem digital adalah perkembangan dari sistem analog. Sebuah sistem digital menggunakan urutan angka untuk mewakili informasi. Tidak seperti sinyal analog, sinyal digital bersifat noncontinuous. Peralihan sistem analog ke digital ini, telah mengubah banyak hal. Termasuk industri media. Kata media sendiri berasal dari bahasa latin yang memiliki arti sebagai perantara sebuah informasi dengan penerima informasi atau media

perantara. Media baru secara sederhana adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet secara khususnya. Contohnya sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan internet yang di dalamnya ada social network, situs-situs web penyedia video dan audio. Bisa juga handphone di zaman sekarang ini karena mirip dengan komputer.

Peralihan pembaca media ini cukup berpengaruh pada keberlangsungan media. Ini bisa dilihat dari sejumlah data dan fakta, bahwa sudah banyak media (cetak) yang gulung tikar karena tidak lagi diminati pembaca meski berita- berita yang disajikan bagus. Karena itu, banyak industri media yang dulu berbasis pada cetak (printed) kini sudah banyak yang beralih ke sistem online. Ini, tak lepas dari pesatnya perkembangan industri layanan internet. Sebagian besar pelanggan media (cetak) telah beralih memanfaatkan teknologi online. Karena lebih fleksibel, bisa membaca informasi terbaru kapan dan di mana saja menggunakan smartphone berbasis android –selama ada jaringan internet. Ini berbeda dengan cetak, yang harus menungu besoknya untuk bisa meng-update informasi baru.

Era digital bukanlah digitalisasi konten media ke bit, tetapi kehidupan yang dinamis dari "new media" isi dan hubungan interaktif dengan konsumen media itu sendiri sebagaimana digambarkan Lev Monovich. Jadi terletak pada pengaksesannya secara real time (kapan saja dengan mudah). Jadi (New Media) adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer, atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai "media baru" adalah digital, seringkali memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mampat, interaktif dan tidak memihak. Beberapa contoh missal internet, website, komputer multimedia, permainan komputer, CD-ROMS, dan DVD. Media online kini telah makin berkembang di masyarakat.

Selanjutnya pada peneltia ini diguakan Konsep Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.(Keterbukaan Informasi Publik, 2008)

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sebagai suatu kebijakan publik, implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik haruslah dilakukan dengan tepat. Ini karena implementasi mencakup beragam tindakan, yakni mengumpulkan data, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah, mengalokasikan dan merekrut personalia, merencanakan atas masa depan dan lain-lain (Edwards, 2003:1-2). Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Menurut Edward III (seperi dikutip Awang, 2010:44), keempat faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, dalam (Indah & Hariyanti, 2018).

Dalam Undang-Undang KIP informasi yang berhak di berikan kepada publik adalah informasi yang termasuk kategori informasi publik. Undang-Undang KIP mengatur beberapa jenis informasi publik; pertama informasi pubik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Kedua, informasi publik yang wajib diumumkan secara sementara. Ketiga, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Keempat, informasi publik yang wajib disediakan oleh

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara. Kelima, informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik. Undang-Undang KIP juga mengatur informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa diberikan ke publik.

Hadirnya undang-undang keterbukaan informasi publik memudahkan setiap individu atau kelompok dalam suatu wilayah atau daerah untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkannya. Adanya kemudahan tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat. Dengan demikian, konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia yang menitikberatkan pada rakyat, yakni dari rakyat oleh rakyat oleh rakyat dapat tercapai.

Ada beberapa tujuan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik. Satrio, dkk., 2010:4-5). Pertama, menjamin hak masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh badan publik dari mulai perencanaa program kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik hingga pengambilan keputusan publik. Kedua, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, agar publik mengetahui alasan diambilnya suatu kebijakan publik tertentu yang mempengaruhi orang banyak. Kelima, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berikut penelitian yang sejenis dan terkait yang peneliti jadikan acuan untuk melakukan penelitian ini Dalam kajian pustaka ini, peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu yang sejenis sebagai bahan perbandingan serta acuan dalam penyusunan penelitian.

Penelitian pertama dari (Kuding & Irwansyah, 2020), tujuan dari peneltian ini Penelitian ini menggunakan teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan (uses and gratification theory) dengan mewawancarai 4 informan terkait pengalamannya menggunakan aplikasi dan sebagai tim pengelola. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan ragam aplikasi seluler dalam pemenuhan kebutuhan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Temuan dalam penelitian mengindikasikan respon positif pengguna aplikasi terhadap aplikasi-aplikasi seluler berbasis android dan iOS yang diluncurkan oleh KPK. Dari sisi pengguna, aplikasi seluler antikorupsi mampu memenuhi kebutuhan khususnya kemudahan dalam akses yang tidak terikat ruang dan waktu. Namun demikian, masih diperlukan pengembangan untuk aplikasi-aplikasi tersebut, baik terkait tampilan, nilai manfaat konten, keterandalan data dan bagaimana memanfaatkan konten tersebut untuk pencegahan korupsi.

Persamaaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang ialah meneliti tentang digitalisasi terkait dengen keterbukaan informasi badan publik dalam ini KPK. Sementara perbedaannya pada pendekatan, teori dan teknik analysis data yang digunakan sehingga hasil penelitian juga berbeda.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Nababan, 2020) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelayanan lembaga penyiaran dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada LPP TVRI Padang agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai UU No.14 Tahun 2008 dengan peningkatkan kompetensi SDM agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK), dan dapat segera menggunakan aplikasi yang telah ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat sehingga mampu bersaing dengan lembaga publik lainnya.

Adapun persamaan penelitian kedua ini dengan yang dilakukan peneliti pada tema penelitian yaitu tentang keterbukaan informasi publik pada badan publik. Pendekatan penelitian juga sama tetapi perbedaanya pada landasan teori yang digunakan dan objek penelitian yang berbeda. Sehingga hasil penelitian juga sangat berbeda.

Mengacu pada latar belakang yang digambarkan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan bagaimana Implementasi Aplikisi Digital "DPR NOW" dalam pemenuhan hak atas informasi publik oleh Humas DPR RI.

METODOLOGI

Pada prinsipnya, paradigma sangat membantu untuk mempercepat dan menyelesaikan penelitian dengan terarah (Ardial, 2014) Paradigma yang digunakan dalam Penelitian ini adalah paradigma post positivisme. Peneliti menggunakan paradigma post positivisme karena Peneliti ingin mengetahui bagaimana Aplikasi Digital "DPR Now!" dalam Pemenuhan Hak Atas Informsasi Publik. Paradigma post positivisme dikatakan lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil dengan berbagai metode. Oleh karena itu peneliti memilih paradigma ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Aplikasi Digital "DPR Now!" dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik" adalah metode studi kasus. Penelitian studi kasus adalah sebuah penelitian dimana prosesnya dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti (Yin, 2018). Melalui studi kasus, peneliti memilih suatu kasus untuk mengilustrasikan suatu isu dan menganalisa kasus tersebut secara detail. Dalam hal ini objek penelitian adalah badan publik yaitu DPR RI. Secara umum penelitian studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan penelitiannya berkenaan dengan how atau why disertai alasan peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol pristiwa-pristiwa yang akan ditelitinya.

Pada penentuan narasumber dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2016)), purposive sampling adalah peneliti menentukan kriteria yang diwawancarai dimana narasumber tersebut dianggap dapat memberikan dan mengetahui informasi serta terlibat secara langsung atau pun yang memahami masalahnya secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang sesuai dan benar. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data dengan melakukan reduksi data mengenai penelitian, penyajian data hasil reduksi disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis agar dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.

.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan hasil gagasan dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kebijakan lingkungan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan.

Secara umum tujuan dari dibentuknya UU No.14 tahun2008 tentang KIP, yang pada intinya menjamin hak publik akan akses informasi publik pada badan publik. Undang-Undang ini bertujuan untuk: 1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan kebijakan publik; 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; 4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Aplikasi mobile saat ini sangat dibutuhkan karena alat-alat telekomunikasi yang tersebar di seluruh dunia membutuhkan aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan penggunanya dimanapun dan kapanpun terutama dalam hal informasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel seperti pager, telepon selular dan PDA. **A**plikasi merupakan software yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan dan penambahan data.

"DPR Now!" adalah sebuah aplikasi layanan informasi publik secara sederhana yang berbasis android dan iOS ini bertujuan untuk membantu publik mendapatkan informasi secara cepat. Dengan aplikasi ini, aspirasi atau pengaduan bisa dilakukan dan dimonitor dengan mudah secara online selain itu, masyarakat juga bisa mengakses dan mengikuti seluruh kegiatan DPR.

Aplikasi ini sebagai wujud kreativitas DPR menghadapi Revolusi Industri 4.0. Semua terkoneksi secara online dan serba digital. Dengan kemudahan teknologi, kita harapkan kualitas demokrasi akan meningkat, sehingga demokrasi benar-benar menjadi jalan bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan.

Aplikasi ini disesuaikan denggan kebutuhan masyarakat dengan mempermudah melalui fitur-fitur "DPR Now!". Fitur tersebut adalah fitur *Pengaduan,* fitur ini merupakan bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima dan/atau menindaklanjuti aduan masyarakat. Berikutnya ada fitur *Aspirasi*, fitur ini merupakan suatu aktivitas/kegiatan anggota DPR RI yang lebih terfokus pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Fitur *Informasi*, data-data yang terdapat di fitur informasi seperi Daftar Anggota, Legislasi, Naskah Akademik, Berita, Agenda, Hasil. Fitur yang terakhir *Video Streaming, fitur ini merupakan* sebuah komunikasi yang dilakukan melalui *broadcas*t akses internet untuk menghasilkan sebuah gambar dan video. Video streaming ini akan menampilkan kegiatan rapat dari seluruh komisi I hingga XI (gambar

Gambar 3. Fitur aplikasi DPR Now!
(sumber: aplikasi DPR Now!)

Terkait pemenuhan informasi publik, "DPR Now!" menjadikan aplikasi sebagai salah satu media informasi dan pelayanan untuk publik, maka bisa menimbulkan sebuah penilaian atau citra yang baik dari publik tentang DPR RI. Karena aplikasi tersebut berisi informasi dan pelayanan yang lengkap seputar kegiatan dan kinerja anggota DPR RI dan mudah juga cara mengakses aplikasi tersebut.

Aplikasi "DPR Now!" adalah salah satu media yang menjembatani Anggota DPR RI dengan masyarakat umum, karena aplikasi DPR Now ini menjadi alat pembantu menyebarluaskan informasi dan pelayanan untuk masyarakat umum. Lalu aplikasi ini juga mudah diakses dan tampilannya sangat menarik.

Pelayanan informasi bukan hanya dilakukan dikantor Gedung DPR RI, tetapi sekarang dapat melalui aplikasi contohnya seperti, aplikasi "DPR Now!". informasi atau berita tentang kegiatan dan kinerja anggota DPR RI juga disebar melalui media online dan media social lainnya seperti facebook, Instagram dan twitter. Nah, dari semua media sosial yang digunakan oleh Humas DPR RI mempunyai fungsi yang sama yaitu menyebarluaskan berita informasi dan pelayanan untuk masyarakat yang lengkap seputar DPR RI.

Aplikasi "DPR Now!" adalah media informasi yang baru berguna bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga sekarang masyarakat mulai menggunakan aplikasi atau media social untuk mengetahui berita dan informasi tentang DPR RI.

Humas DPR RI secara transaksional memerlukan waktu yang lama, sementara kebutuhan informasi kepada internal dan eksternal sangat besar. Karena itu dibutuhkan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan komperhesnsif. Awal mulanya kenapa kami buat aplikasi DPR Now karena melihat masyarakat ingin mencari informasi dan mendapatkan pelayanan transaksional. Sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik atau pengaduan. Maka dari itu kami membuat aplikasi ini, dengan tujuan agar lebih dekat dengan masyarakat dan mereka pun dengan lebih muda dan nyaman mendapatkan informasi dan layanan publik.

Layanan informasi melalui aplikasi kepada publik cukup efesien karena isi update dalam aplikasi DPR Now selalu di update dengan informasi yang baru tentang kegiatan seputar DPR RI dan secara real time. Dari seluruh proses yang dijelaskan diatas tujuan yang dicapai dalam memilih aplikasi sebagai suatu layanan informasi yang mampu memberikan informasi secara cepat dan memberikan kemudahan untuk para pengguna.

Aplikasi "DPR Now!" sangat mudah digunakan untuk layanan informasinya, aplikasi ini dibuat semenarik mungkin, mudah dipahami oleh banyak orang dan begitupula untuk content dan contex nya kita buat se-simple mugkin. Para pengguna bisa melihat semua kegiatan DPR RI melalui aplikasi "DPR Now!". Kelebihan dari aplikasi ini ada option live streamingnya jadi para pengguna bisa melihat dan memantau rapat dari Alat Kelengkapan Dewan dengan mira kerja dan rapat paripurna.

Ketika membuat konten kita buat semenarik mungkin dan ada beberapa filterisasi bekerjasama dengan team media lainnya serta proses dalam mempublikasikan berita, karena agar tidak terjadi ambigu. Dalam membuat konten berita dan penulisan kita buat se-akurat mungkin maka dari itu dengan adanya Aplikasi "DPR Now!" ini kan tujuannya untuk menghindari hoax atau berita yang tidak jelas sumbernya. Sehingga informasi publik tersebut bisa dipertanggung jawabkan dan memiliki kreadibilitas. Salah satu cara kami agar dapat membangun kreadibiltas dari publik adalah dengan menyediakan option layanan pengaduan.

Aplikasi yang disediakan oleh DPR RI untuk para pengguna/masyarakat umum yang memiliki informasi dan ingin melaporkan dipengaduan apa yang terjadi dilingkungan sekitar

mereka. Namun, kami juga menyaring informasi yang kita dapat mana yang relevan atau tidak untuk jadi bahan diskusi ke komisi yang terkait.

Dalam memberikan layanan informasi publik di aplikasi "DPR Now!" disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks yang ada sehingga masyarakat yang mengakses merasa puas. Content dalam aplikasi "DPR Now!" cukup jelas dengan menggunakan Bahasa yang sangat mudah dipahami karena menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dapat bermanfaat.

Informasi publik dalam aplikasi "DPR Now!" bersumber dari team media internal DPR RI, seperti TV parlemen, publisitas, pemberitaan dan keprotokolan. Team media Parlemen biasanya bermencar-mencar ke semua komisi untuk meliput kegiatan DPR RI, baik itu diluar gedung (kunker) maupun didalam gedung. Jadi berita dari mereka akan di masukkan ke dalam aplikasi.

Demi mencapai target yang dituju, Humas DPR RI harus menggunakan saluran yang tepat seperti aplikasi sebagai saluran utama dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada publik, aplikasi yang sekarang menjadi layanan informasi yang mudah dan cepat diakses oleh publik, sehingga publik mendapat informasi dan pelayanan dengan cepat dan mudah. Sedangkan media social seperti facebook, twitter, Instagram dan media cetak sebagai media pendukung dalam memberikan layanan informasi juga berupa kegiatan DPR RI.

Mengenai aplikasi "DPR Now", publik mengharapkan agar tetap dijaga kualitas pelayanan informasi melalui aplikasi tersebut, karena sejauh ini aplikasi dari Humas DPR RI sudah cukup baik sehingga masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan informasi secara up to date dan real time.

Pembahasan

Dalam pengelolaan informasi dibutuhkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan dukungan khusus yang menunjukkan kemampuan mengelola dan menyajikan informasi yang berklasifikasi, berkala, serta merta, setiap saat dan atas permintaan. Proses penyampaian informasi dalam aplikasi "DPR Now" dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari Alat Kelengakapa Dewan (AKD), misalnya hasil keputusan rapat, laporan singkat, pansus, dan dokumen informasi keanggotaan komisi dapat juga dilihat di aplikasi dan media sosial.

Sebagai Lembaga Negara Humas DPR RI memberikan informasi ataupun data yang cukup bagi masyarakat, hal ini transparansi dan akuntabilitas dari kegiatan anggota DPR RI dapat dimonitor langsung oleh publik dan keterbukaan informasi publik merupakan yang wajib diberikan oleh Lembaga Negara pada pemohon informasi sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan.

Dan mampu menerima keluhan atau masukan dari publik sebagai acuan untuk Humas DPR RI supaya terus bisa memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang terjadi karena tujuan dari sebuah aplikasi "DPR Now!" ini memberikan layanan informasi dan informasi secara up to date dan real time dan mendekatkan masyarakat dengan DPR RI serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tagline nya yaitu "DPR Dalam Genggaman Tangan".

Media atau platform yang digunakan dalam praktik humas DPR RI dalam memberikan informasi layanan publik melalui aplikasi "DPR Now!" sudah sangat efesien dan efektit dengan menghadirkan layanan informasi dan informasi yang secara real time dan relevan pada saat kegiatan AKD dengan mitra kerja, pesan yang disampaikan menyesuaikan keadaan dan kegiatan yang sedang berlangsung seperti, sosialisasi, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat dan kunker ke berbagai wilayah provinsi, membaas kebijakan dan BKSAP.

Hal ini mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat terutama pengguna aplikasi DPR Now karena memberikan layanan informasi dari berbagai daerah dan informasi yang bermanfaat serta menambah pengetahuan wawasan dan pengetahuan masyarakat.

Aplikasi "DPR Now!", pengguna aplikasi sangat membantu memberikan dan menyebarluaskan informasi publik. Kelebihan dari aplikasi ini para pengguna adanya option live streaming, layanan pengaduan, serta gambar yang menarik dan kreatif, aplikasi ini dapat dijangkau secara luas bisa digunakan dimana saja dan kapan saja serta ekonimis. Humas DPR RI terus melakukan peningkatan kualitas aplikasi "DPR Now!" sebagai media informasi publik agar masyarakat merasa puas terhadap kinerja DPR RI dan informasi yang mereka dapat, serta informasi yang berikan secara konsistensi dan terus menerus agar tetap menjaga interaksi dengan masyarakat.

Namun sudah umum dalam pelaksanaannya humas dihadapkan dengan beberapa hambatan, Humas DPR RI menyadari aplikasi "DPR Now!" kurangnya up to date dalam publikasi berita dalam timeline aspirasi di aplikasi "DPR Now!", karena dalam penyebaran informasi harus melalui beberapa tahap sehingga mana yang relevan untuk publish atau tidak. Selain itu proses penyebaran berita terbagi dari beberapa team media yang mana harus melaraskan berita tersebut lalu di share ke aplikasi "DPR Now!" dan hambatan gangguan jaringan internet dari provider sehingga memperlambat proses penyebaran dan layanan informasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Implementasi Aplikasi "DPR Now!" Dalam Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Oleh Humas DPR RI, maka peneliti akan memaparkan hasil kesimpulan dan saran sebagai berikut: Humas DPR RI telah melaksanakan pemenuhan hak atas informasi publik melalui aplikasi DPR Now sebagai salah satu media informasi dan layanan publik yang mampu menyajikan dan menyebarluaskan informasi melalui aplikasi DPR Now secara real time kepada masyarakat dengan cepat, efektif dan efesien. Meskipun dalam memberikan informasi guna memenuhi hak atas informasi publik melalui aplikasi "DPR Now!" telah menjangkau publik diseluruh Indonesia namun ditemukan pula hambatan-hambatan yang memperlambat penyebaran informasi dan layanan informasi. Adapun hambatan tersebut seperti gangguan jaringan internet, sehingga informasi menjadi terganggu, ketika masyarakat ingin mengakses aplikasi "DPR Now!" dan hambatan lainnya yaitu kurang up to date dalam penyebaran berita aspirasi/informasi dikarenakan melaraskan sebuah berita dari beberapa team media dan AKD, sehingga membutuhkan waktu untuk mempublish sebuah berita ke aplikasi "DPR Now!".

DAFTAR PUSATAKA

Aji, R. (2016). Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic Communication Journal*, *1*(1), 43–54. https://doi.org/10.21580/icj.2016.1.1.1245

Anwar, R. K., & Rusmana, A. (2017). Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, *6*(3), 204–208.

Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. PT Bumi Aksara.

Helmizar. (n.d.). *(2018, September).Wawancara Pribadi*.

Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, *12*(2), 127–140.

https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3

Kuding, I. M., & Irwansyah, I. (2020). Pemanfaatan Ragam Aplikasi Seluler Antikorupsi dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Komunikasi*, *12*(2), 263. https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.8626

Nababan, S. (2020). Strategi Pelayanan Informasi untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *17*(2), 166. https://doi.org/10.31315/jik.v17i2.3694

Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.

Priyatna, C. C., Prastowo, F. A. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, *8*(1), 114. https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.26115

Ratnamulyani, Rijallahudin, & Kusumadinata. (2016). Pengaruh Penggunaan Layanan Aplikasi Digital Google Play Dalam Smartphone Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Effect Of The Use Of Digital Service Application On Google Play Smartphone In Meeting The Information Needs Student Pada Pendahuluan. *Jurnal Komunikatio*, *2*(3), 135–146.

Saleh, R., & Thahir, S. (2019). Pola Komunikasi Pengguna Aplikasi Chatting (Studi Pada Komunitas Android Makassar). *Jurnal Jurnalisa*, *4*(1), 91–105. https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5623

Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2009.03946.x

Trisnani, T. (2018). Implementasi E-Government Public Relations Sebagai Peningkatan Pelayanan Publik, Dilingkungan Pemerintah Daerah Di Jawa Timur Dan Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, *7*(3). https://doi.org/10.31504/komunika.v7i3.1781

Keterbukaan Informasi Publik, Republik Indonesia (2008).

Wulanadary, A., Sudarman, S., & Ikhsan, I. (2019). Inovasi BPJS Kesehatan Dalam Pemberian Layanan Kepada Masyarakat: Aplikasi Mobile JKN. *Jurnal Public Policy*, *5*(2), 98. https://doi.org/10.35308/jpp.v5i2.1119

Yin, R. K. (2018). *Studi Kasus: Desain & Metode*. PT. Raja Grafindo Persada.